

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan istilah yang digunakan untuk menjelaskan mengenai kondisi ekonomi dan sosial secara bersamaan dalam waktu jangka panjang. Pembangunan ekonomi memiliki tujuan dalam membangun peralatan modal dalam meningkatkan produktivitas pertanian, pertambangan, perkebunan, dan perindustrian. Modal juga digunakan dalam mendirikan fasilitas pendidikan, kesehatan, jalan raya, dan perhubungan. Penciptaan modal ekonomi dan *overhead sosial* dapat dilakukan dengan penundaan kegiatan konsumsi lebih sedikit dan sisanya untuk kegiatan menabung dan investasi dalam peralatan modal.<sup>1</sup>

Pembentukan modal yang dilakukan oleh negara berkembang, bersumber dari domestik dan sumber eksternal. Sumber domestik misalnya saja kenaikan pendapatan nasional, tabungan, pajak, pinjaman publik, dan keuntungan badan usaha. Sumber eksternal bisa berasal dari bantuan negara asing dan batasan impor.<sup>2</sup> Dimana dari sumber pembentukan modal domestik maupun negara asing diistilahkan dengan investasi. Investasi produktif yang digunakan dalam pembelian pabrik baru, mesin, dan bahan produksi yang dikombinasikan dengan investasi sumber daya manusia dalam meningkatkan

---

<sup>1</sup> M. L. Jhingan, *The Economic of Development and Planning* (Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan) penerjemah D. Guritno, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hal. 338

<sup>2</sup> *Ibid.*, hal. 345—351

kualitas akan membentuk akumulasi modal. Akumulasi modal inilah yang dapat memperbesar *output* yang diinginkan perusahaan.<sup>3</sup>

Pembangunan ekonomi tidak dapat terpisahkan dari pertumbuhan ekonomi. Karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi dijadikan acuan dalam penyusunan rencana pembangunan nasional dan daerah di samping pembangunan fisik dan sosial. Perbedaan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah diakibatkan oleh kondisi lokasi, geografis, dan variasi potensi ekonomi yang berlaku antar daerah berakibat pada ketimpangan daerah.<sup>4</sup> Ketimpangan daerah ini dapat ditanggulangi oleh kebijakan pemerintah daerah melalui otonomi daerah. Suatu daerah berhak untuk menjalankan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan kondisi di daerah masing-masing. Melalui otonomi daerah, ketimpangan dapat diatasi dengan membangun prasarana fisik, pengembangan fasilitas pendidikan, dan pengembangan fasilitas kesehatan yang membutuhkan dana pembangunan antar daerah.

Dana pembangunan antar daerah berasal dari investasi. Alokasi investasi yang terjadi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan rencana pembangunan ekonomi antar daerah. Investasi yang didapatkan suatu daerah berasal dari pemerintah, investasi pihak swasta, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dan Penanaman Modal Asing (PMA). Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) memiliki bidang usaha terbuka bagi swasta seperti bidang

---

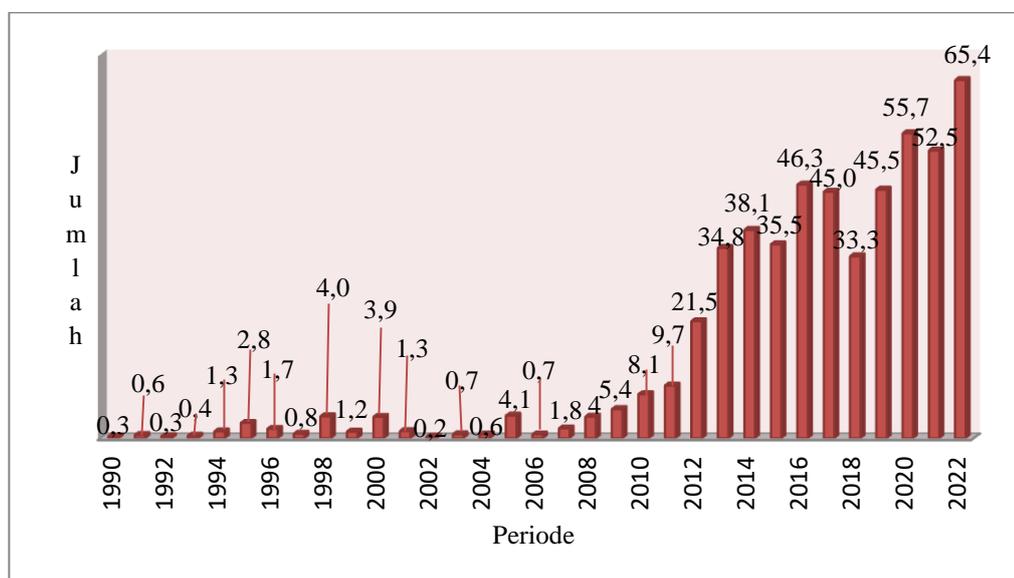
<sup>3</sup> Michael P. Todaro, *Economic Development in The Third World* (Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga) alih bahasa Aminuddin dan Mursid, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hal. 140—141

<sup>4</sup> Sjafrizal, *Analisis Ekonomi Regional dan Penerapannya di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hal. 95—96

perdagangan dan bidang industri. Sementara Penanaman Modal Asing (PMA) memiliki bidang usaha terbuka yang memiliki prioritas dan syarat-syarat tertentu ditetapkan oleh pemerintah.<sup>5</sup> Alokasi investasi antar daerah dipengaruhi oleh dua hal penting yaitu kondisi dan struktur ruang daerah serta sistem perekonomian nasional. Alokasi investasi antar daerah dapat berbentuk investasi swasta (*privat investment*) dan investasi pemerintah (*public investment*).<sup>6</sup> Berikut adalah data yang menjelaskan mengenai penerimaan investasi di Provinsi Jawa Timur yang berasal dari PMDN dan PMA

**Grafik 1.1**

**Penerimaan Penanaman Modal Dalam Negeri (Juta Rupiah) Provinsi Jawa Timur**



Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tahun 1990-2022

Berdasarkan grafik 1.1 menunjukkan bahwa PMDN selama 33 periode mengalami peningkatan. Di tahun 2022 jumlah PMDN di Provinsi Jawa Timur

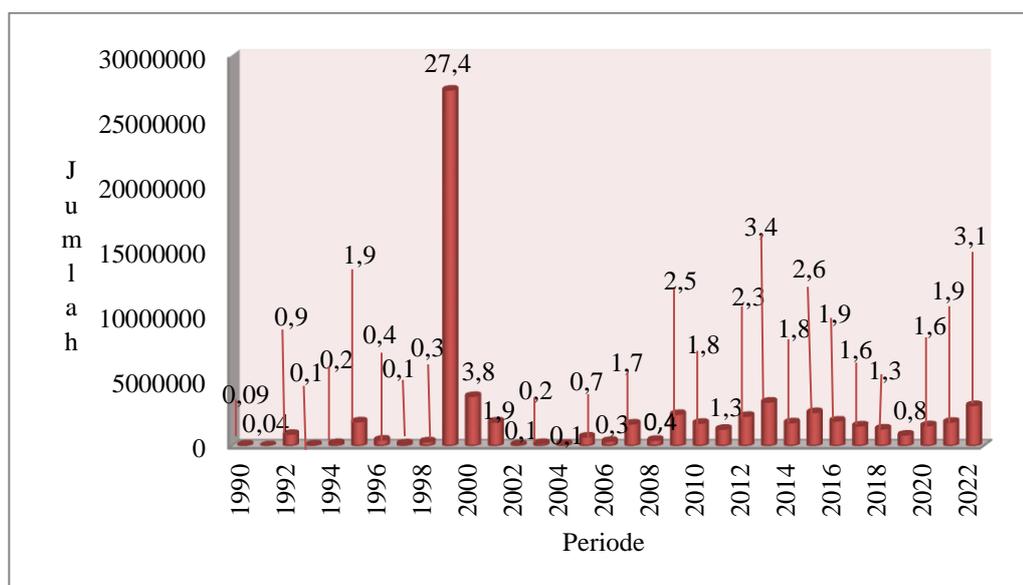
<sup>5</sup> I. G. Rai Widjaya, *Penanaman Modal*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005), hal. 24—26

<sup>6</sup> Sjafrizal, *Analisis Ekonomi Regional dan Penerapannya di Indonesia*, ..., hal. 146

sebesar 65.355.949,2 juta rupiah meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 52.552.238,5 juta rupiah. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang dilakukan oleh pemerintah maupun pihak swasta dalam bentuk perusahaan seperti Perseroan Terbatas, CV, dan BUMN memiliki faktor yang mempengaruhi. Faktor tersebut tidak jauh berbeda dengan penerimaan PMA antara lain seperti sumber daya yang tersedia di daerah, letak geografis, dan kebijakan-kebijakan dari pemerintah daerah dalam menciptakan iklim investasi yang baik.<sup>7</sup>

**Grafik 1.2**

**Penerimaan Penanaman Modal Asing (US\$) Provinsi Jawa Timur**



Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tahun 1990-2022

Berdasarkan grafik 1.2 menunjukkan bahwa penerimaan PMA di Provinsi Jawa Timur tertinggi terjadi di tahun 1999 sebesar 27.382.070,7 US\$. Setelah akhir tahun 1999 penerimaan PMA mengalami kenaikan dan

<sup>7</sup> Toman Sony Tambunan, *Prinsip-Prinsip Penanaman Modal di Indonesia*, (Yogyakarta: Expert, 2021), hal. 42

penurunan. Hal dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dipertimbangkan oleh investor seperti keadaan ekonomi suatu daerah, situasi politik daerah yang bersangkutan, jaminan kepastian hukum dalam perlindungan investasi, ketersediaan sumber daya alam, kualitas sumber daya manusia, struktur pasar, dan kebijakan pemerintah yang mendukung iklim investasi berjalan dengan lancar.<sup>8</sup> Maka dari kedua penerimaan investasi tersebut ada faktor ekonomi dan non ekonomi yang mempengaruhi investor tertarik menanamkan modalnya pada daerah tersebut. Investor mencari daerah yang potensial untuk mendapatkan pengembalian investasi yang diinginkan dengan risiko yang minim.

Faktor pertama yang diduga mempengaruhi penerimaan investasi di Provinsi Jawa Timur adalah masalah infrastruktur. Infrastruktur sebagai prasarana yang membantu proses ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat perlu untuk dibangun. Namun, karena adanya ketimpangan antar daerah maka pembangunan infrastruktur lebih fokus kepada daerah yang dianggap potensial seperti di pusat ibukota. Infrastruktur dapat dikategorikan menjadi infrastruktur sosial dan infrastruktur ekonomi. Infrastruktur sosial lebih ditujukan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia seperti fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas pelatihan.

Sedangkan infrastruktur yang berhubungan dengan ekonomi adalah perhubungan memiliki fungsi utama untuk proses mobilisasi dari proses produksi antar daerah. Maka untuk mendukung mobilisasi tersebut diperlukan

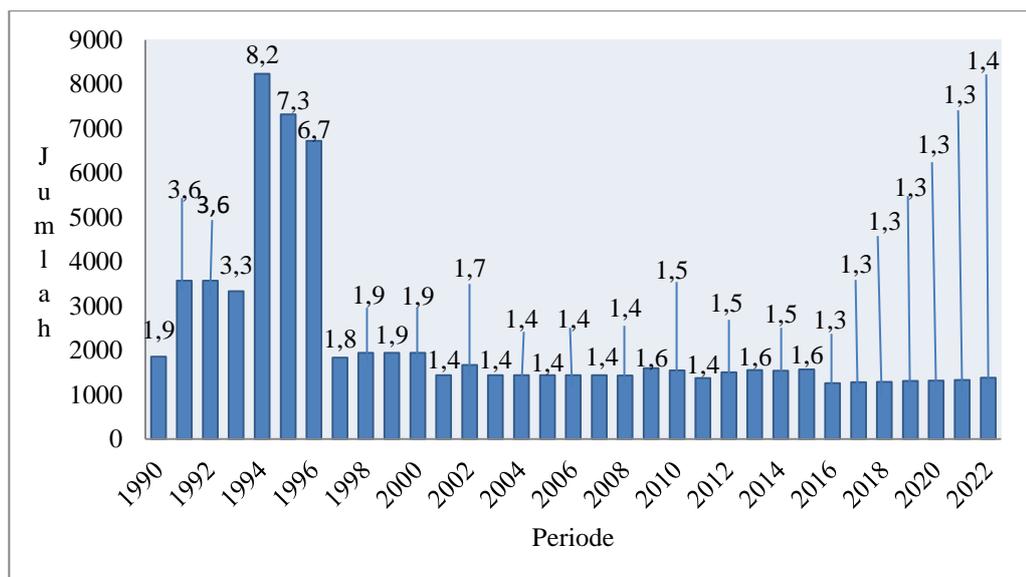
---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hal. 60

pembangunan infrastruktur seperti fasilitas jalan, fasilitas angkutan, fasilitas jaringan dan telekomunikasi.<sup>9</sup> Dengan adanya infrastruktur yang layak akan menarik investor untuk menanamkan modalnya dan meningkatkan kegiatan produksi serta penyediaan lapangan kerja. Hal ini yang akan mendorong proses pembangunan ekonomi di daerah yang kurang maju dapat diatasi. Berikut adalah data infrastruktur yang diwakili oleh panjang jalan dalam kondisi baik di provinsi Jawa Timur selama 33 periode.

**Grafik 1.3**

**Panjang Jalan dalam Kondisi Baik (Km) Provinsi Jawa Timur**



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur tahun 1990-2022

Berdasarkan grafik 1.3 menunjukkan bahwa selama 33 periode, infrastruktur panjang jalan dalam kondisi baik dan mengalami tingkat pembangunan tertinggi pada tahun 1994 yang mencapai 8.236 km. Setelahnya, jumlah infrastruktur panjang jalan mengalami penurunan sampai

<sup>9</sup> Sjafrizal, *Analisis Ekonomi Regional dan Penerapannya di Indonesia*, ..., hal. 140

di tahun 2022. Di tahun 2022, jumlah panjang jalan yang dibangun dalam kondisi baik hanya berkisar 1.386,33 km di Provinsi Jawa Timur.

Selain faktor infrastruktur yang memadai pada daerah, penerimaan investasi juga dipengaruhi oleh sumber daya manusia yaitu tenaga kerja. Tenaga kerja adalah penduduk yang sudah bekerja untuk menghasilkan suatu barang dan jasa guna pemenuhan kebutuhan hidup sendiri dan masyarakat dengan batasan minimum umur 15 tahun.<sup>10</sup> Dalam tenaga kerja mencakup mengenai angkatan kerja yang dikaitkan dengan individu yang sudah bekerja atau setengah menganggur. Dikatakan setengah menganggur karena faktor pendapatan, produktivitas, jenis pendidikan, dan pekerjaan yang tidak sesuai dengan keahlian.

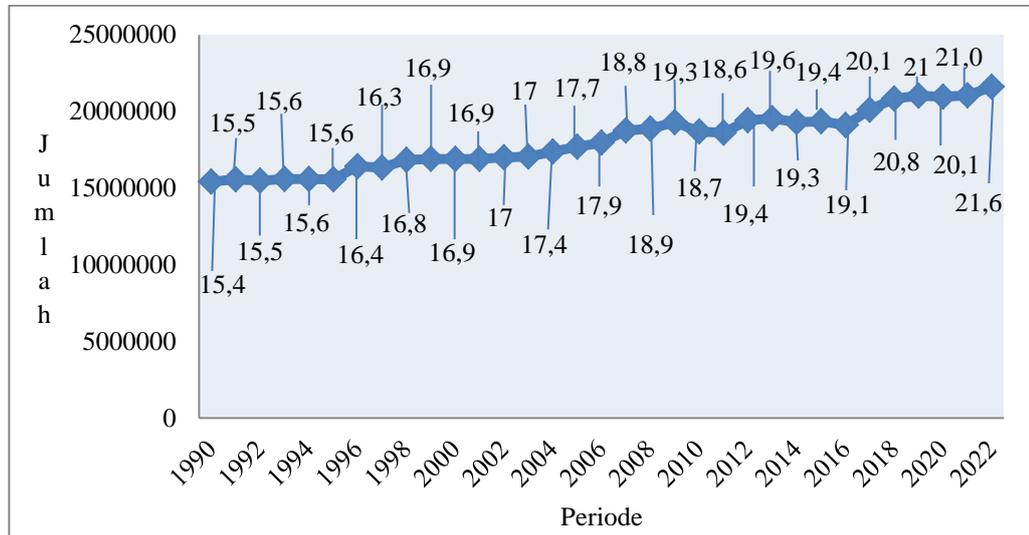
Penerimaan investasi berhubungan dengan sumber daya manusia. Dengan kualitas sumber daya manusia yang mumpuni akan meningkatkan produktivitas dan pendapatan atau *output* dari perusahaan. Hal ini sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Adam Smith mengenai sumber daya manusia yang dijadikan *input* pada proses produksi dalam menentukan kemakmuran suatu bangsa. Dalam hal ini Adam Smith juga menekankan pada pembagian kerja yang meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Peningkatan produktivitas dihubungkan dengan keterampilan kerja, penghematan waktu dalam memproduksi suatu barang dan penemuan mesin yang menarik investor untuk menanamkan modalnya di daerah tersebut. Berikut adalah data angkatan kerja di Provinsi Jawa Timur dalam 33 periode

---

<sup>10</sup> Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), hal. 26

Grafik 1.4

### Angkatan Kerja (Juta Jiwa) Provinsi Jawa Timur



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur tahun 1990-2022

Berdasarkan grafik 1.4 menunjukkan bahwa angkatan kerja di Provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan selama 33 periode. Jumlah angkatan kerja tertinggi ditunjukkan pada tahun 2022 sebesar 21.613.293 juta jiwa ini tersebar pada pada sektor pertanian, sektor kelautan, sektor perindustrian, dan wirausahawan. Kondisi Covid-19 tahun 2020, mengakibatkan jumlah angkatan kerja turun menjadi 20.962.508 juta jiwa jika dibandingkan tahun 2019 sebesar 21.032.612 juta jiwa.

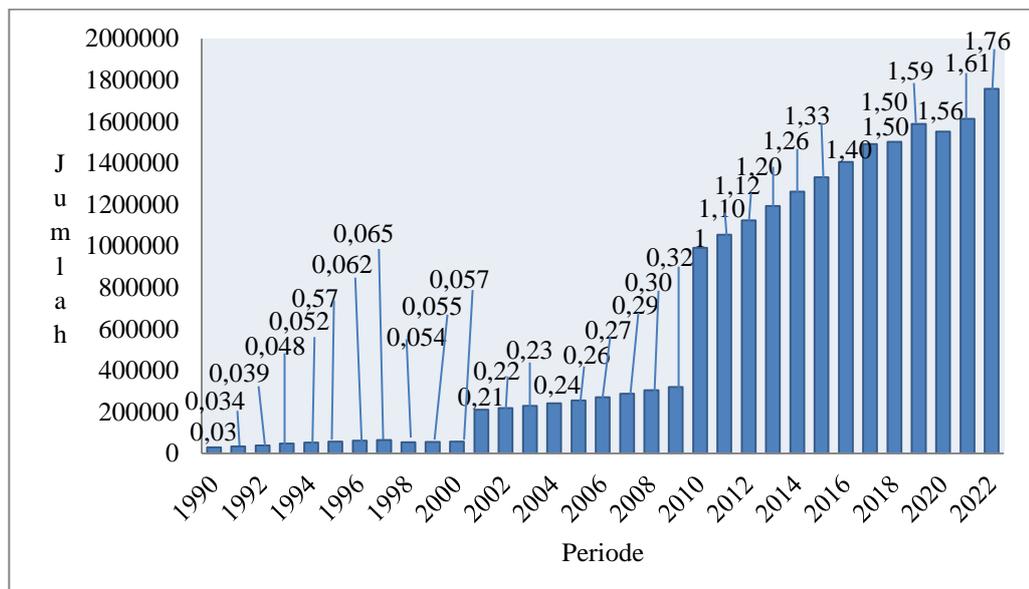
Selain faktor sosial yang memberikan pengaruh terhadap penerimaan investasi, ada faktor lain seperti pertumbuhan ekonomi yang terjadi di daerah akan mempengaruhi penerimaan investasi yang didapat. Dalam teori yang disampaikan oleh Harrod-Domar menjelaskan bahwa ketika pertumbuhan ekonomi tinggi maka akan menarik investor untuk menanamkan modalnya. Investasi memiliki fungsi ganda yaitu menciptakan pendapatan dan

memperbesar kapasitas produksi perekonomian untuk meningkatkan stok modal.<sup>11</sup> Untuk mengetahui kondisi ekonomi yang baik dapat dilihat dari pendapatan nasional yang dihitung dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Namun, dalam negara berkembang dan daerah tertentu penerimaan investasi tidak hanya dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi. Ada faktor lain yang berhubungan dengan penciptaan iklim investasi seperti kondisi politik dan kebijakan-kebijakan tertentu yang dijalankan oleh pemerintah dalam menarik investor. Penerimaan masyarakat dan kondisi sumber daya alam menjadi salah satu ketertarikan dalam penanaman modal yang dilakukan lebih jauh oleh luar negeri dan pihak swasta. Berikut adalah data pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur dalam 33 periode

**Grafik 1.5**

**Produk Domestik Regional Bruto (Miliar) Provinsi Jawa Timur**



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur tahun 1990-2022

<sup>11</sup> M. L. Jhingan, *The Economics of Development and Planning* (Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan) alih bahasa D. Guritno, ..., hal. 229

Berdasarkan grafik 1.5 menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) meningkat selama 33 periode. Selama tahun 2010 hingga tahun 2022 PDRB meningkat, tetapi ada kondisi tertentu yang menyebabkan penurunan. Covid-19 pada tahun 2020 mengakibatkan penerimaan PDRB menurun menjadi 1.552.033,4 milyar. Pasca Covid-19 terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi menjadi 1.857.821,4 milyar karena pemerintah berupaya untuk melakukan pemulihan ekonomi dengan bantuan untuk masyarakat sekaligus industri kecil menengah.

Berdasarkan beberapa faktor makro ekonomi yang diduga mempengaruhi penerimaan investasi seperti infrastruktur, angkatan kerja, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan analisis berkaitan dengan judul **“Pengaruh Infrastruktur, Angkatan Kerja, dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Investasi di Provinsi Jawa Timur Periode 1990-2022”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti dapat mengidentifikasi beberapa masalah supaya penelitian yang dilakukan memiliki ruang lingkup yang jelas. Hal tersebut dikarenakan adanya peningkatan dan penurunan jumlah infrastruktur, angkatan kerja dan PDRB yang mempengaruhi investasi di Provinsi Jawa Timur periode 1990-2022. Dari faktor yang diduga dapat mempengaruhi investasi di Provinsi Jawa Timur, maka dapat diketahui besar kecilnya penerimaan investasi yang

didapat. Apabila penerimaan investasi sesuai dengan yang diharapkan, maka dapat mendorong adanya peningkatan pendapatan dan stok modal. Lebih jauh lagi investasi dapat mempercepat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Pembangunan infrastruktur yang semakin banyak dilakukan tidak dapat secara langsung mempengaruhi investasi, karena perlu waktu panjang dan juga akibat kondisi iklim di daerah yang menyebabkan kualitas infrastruktur kurang terjaga.

Sumber daya manusia yang berlimpah berakibat pada jumlah angkatan kerja yang meningkat. Adanya pemaksimalan produktivitas, tetapi keahlian tenaga kerja yang kurang berkualitas berakibat pada masalah penerimaan investasi. Selain itu juga ditunjukkan pada kondisi ekonomi daerah yang seharusnya menjadi faktor utama, tetapi ada faktor lain yang menjadi pertimbangan dalam penerimaan investasi bagi suatu daerah.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan tersebut, maka peneliti dapat merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Apakah infrastruktur berpengaruh secara jangka panjang dan jangka pendek terhadap investasi di Provinsi Jawa Timur periode 1990-2022?
2. Apakah angkatan kerja berpengaruh secara jangka panjang dan jangka pendek terhadap investasi di Provinsi Jawa Timur periode 1990-2022?
3. Apakah PDRB berpengaruh secara jangka panjang dan jangka pendek terhadap investasi di Provinsi Jawa Timur periode 1990-2022?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh jangka panjang dan jangka pendek infrastruktur terhadap investasi di Provinsi Jawa Timur periode 1990-2022.
2. Untuk menganalisis pengaruh jangka panjang dan jangka pendek angkatan kerja terhadap investasi di Provinsi Jawa Timur periode 1990-2022.
3. Untuk menganalisis pengaruh jangka panjang dan jangka pendek PDRB terhadap investasi di Provinsi Jawa Timur periode 1990-2022.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, diharapkan penelitian ini dapat memiliki kegunaan dan manfaat bagi beberapa pihak, maka penelitian ini memiliki manfaat yang optimal sebagai berikut:

##### **1. Bagi Akademisi**

Penelitian ini memiliki tiga variabel (X) yaitu infrastruktur, angkatan kerja, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang diduga mempengaruhi investasi. Hal ini sesuai dengan mata kuliah yang telah didapatkan mengenai ekonomi makro, ekonomi pembangunan, dan teori investasi serta portofolio.

Investasi dalam ekonomi makro merupakan salah satu variabel yang digunakan dalam menghitung pendapatan selain dari konsumsi dan

tabungan. Lebih jauh lagi investasi berguna untuk meningkatkan stok modal dalam pembangunan ekonomi bagi suatu daerah. Oleh karena itu, dalam menentukan besarnya investasi yang didapatkan, perlu untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh. Informasi tersebut dapat dilihat dalam teori investasi dan portofolio.

## 2. Secara Praktis

Manfaat secara praktis dimaksudkan untuk memberikan solusi terkait permasalahan yang terdapat pada penelitian ini. Sehingga dapat diketahui sebagai berikut:

### a. Bagi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Hasil penelitian ini menggunakan 33 periode yaitu 1990-2022 yang dapat memberikan gambaran dari tren perbedaan penerimaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Sehingga penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan di bidang informasi seperti koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaannya untuk menciptakan iklim investasi yang baik.

### b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi atau acuan untuk memperluas teori dan jangkauan periode yang digunakan ke depannya. Selain itu penelitian ini menggunakan delapan referensi dari penelitian terdahulu yang dapat menjadi sebagian rujukan bagi penelitian selanjutnya.

## **F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian**

### **1. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian yang membahas mengenai faktor-faktor yang memiliki pengaruh terhadap investasi dengan judul “Pengaruh Infrastruktur, Angkatan Kerja, dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Investasi di Provinsi Jawa Timur Periode 1990-2022”. Variabel indikator yang digunakan sebagai berikut:

- a. Investasi, indikator yang digunakan adalah penerimaan PMDN dan PMA di Provinsi Jawa Timur periode 1990-2022 di website Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
- b. Infrastruktur, indikator yang digunakan adalah panjang jalan dalam kondisi baik di Provinsi Jawa Timur periode 1990-2022 di website resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur.
- c. Angkatan Kerja, indikator yang digunakan adalah jumlah orang yang bekerja di Provinsi Jawa Timur periode 1990-2022 di website resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur.
- d. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), indikator yang digunakan adalah PDRB berdasarkan harga konstan di Provinsi Jawa Timur periode 1990-2022 di website resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur.

Pada penelitian ini menggunakan sampel data selama 33 periode terakhir (1990-2022). Diharapkan dengan sampel ini cukup untuk

memperlihatkan pengaruh variabel infrastruktur, angkatan kerja, dan PDRB terhadap variabel investasi di Provinsi Jawa Timur.

## 2. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini menggunakan jumlah data 132 hanya terdapat pada 33 periode terakhir yaitu 1990-2022. Dan juga terbatas pada variabel makro ekonomi yang diduga mempengaruhi investasi secara langsung, sehingga hanya berfokus pada tiga variabel independen (X) yaitu variabel infrastruktur, angkatan kerja, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) serta satu variabel dependen (Y) yaitu investasi.

## G. Penegasan Istilah

Dalam memahami suatu judul penelitian terkadang terdapat kesalahan dalam menguraikan maksud dari peneliti. Oleh karena itu, agar tidak terjadi kesalahan dalam penguraian dari maksud peneliti, berikut akan diuraikan tentang istilah penting dalam penelitian ini.

### 1. Definisi Konseptual

Definisi konseptual menjelaskan mengenai pengertian variabel yang digunakan bersumber dari literatur buku, kamus, maupun jurnal yang relevan dalam penelitian.

#### a. Investasi

Investasi adalah penundaan konsumsi sekarang untuk diinvestasikan ke aktiva produktif selama periode tertentu. Aktiva

produktif berbentuk aktiva nyata dan aktiva keuangan. Investor melakukan investasi untuk meningkatkan utilitinya dalam bentuk kesejahteraan keuangan.<sup>12</sup> Investasi juga dimaksudkan sebagai pengeluaran untuk meningkatkan stok barang modal yang terdiri dari pabrik, mesin, kantor, dan bahan lain yang digunakan dalam proses produksi.

#### b. Infrastruktur

Infrastruktur adalah kebutuhan dasar fisik dalam menjamin keberlangsungan ekonomi dalam sektor publik dan sektor privat serta sebagai layanan berupa fasilitas. Pembangunan infrastruktur dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota dan desa, serta meningkatkan kualitas lingkungan.<sup>13</sup>

#### c. Angkatan Kerja

Angkatan kerja (*labor force*) adalah penduduk yang masuk usia kerja terdiri dari orang yang bekerja dan yang masih mencari pekerjaan (penganggur). Yang bekerja terdiri dari bekerja penuh dan setengah menganggur. Setengah menganggur memiliki ciri pendapatan di bawah ketentuan upah minimum, produktivitas di bawah standar, pendidikan

---

<sup>12</sup> Jogiyanto Hartono, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi: Edisi Kesebelas*, (Yogyakarta: BPFU-UGM, 2017), hal. 5—7

<sup>13</sup> Yusniah Anggraini, *Kebijakan Pemerintah dalam Pembangunan Infrastruktur di Indonesia*, (Jakarta: Indocamp, 2018), hal 4—5

yang tidak sesuai dengan keahlian, dan lainnya seperti jam kerja kurang dari standar.<sup>14</sup>

#### d. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Bruto (PDB) adalah total pendapatan masyarakat baik warga negara Indonesia dan warga negara asing dari semua barang dan jasa dalam sebuah negara.<sup>15</sup> Sedangkan PDRB merupakan gambaran suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Perhitungan PDRB dilakukan melalui perhitungan atas dasar harga konstan dan perhitungan atas dasar harga berlaku.<sup>16</sup>

## 2. Definisi Operasional

Definisi operasional digunakan untuk menjelaskan secara riil atau mengukur variabel dalam lingkup objek penelitian. Maka dapat dijelaskan seperti di bawah ini:

- a. Investasi yang berarti penanaman modal dilakukan untuk meningkatkan stok modal dalam usaha mengembangkan produksi dan membangun pertumbuhan ekonomi seperti investasi pemerintah, investasi swasta, dan penanaman modal dari luar negeri
- b. Infrastruktur yang dibagi menjadi infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial. Infrastruktur ekonomi untuk menunjang proses distribusi barang dan jasa sehingga digunakan panjang jalan dalam kondisi baik.

---

<sup>14</sup> Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), hal. 28

<sup>15</sup> Ali Ibrahim Hasyim, *Ekonomi Makro*, (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 9

<sup>16</sup> BPS Kabupaten Kediri, *Kabupaten Kediri dalam Angka 2023*, (Kediri: UD. Angraini, 2023), hal. 597—602

- c. Angkatan kerja dapat diketahui dari jumlah penduduk yang bekerja di suatu daerah tertentu dan penduduk yang masih mencari pekerjaan (menganggur)
- d. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat dihitung berdasarkan harga konstan yang artinya perhitungan berdasarkan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar.

## H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan kuantitatif dapat dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir. Dengan penjelasannya sebagai berikut:

### 1. Bagian Awal

Pada bagian ini berisi: halaman sampun depan (*cover*), halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan penguji, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar grafik, daftar lampiran, dan halaman abstrak.

### 2. Bagian Utama

Pada bagian utama ini terdiri dari VI (enam) bab dan dari masing-masing bab mempunyai sub bab. Berikut penjelasannya:

Bab I : Pendahuluan

Dalam bab pendahuluan terdiri dari: (a) latar belakang masalah, (b) identifikasi masalah, (c) rumusan masalah, (d) tujuan penelitian, (e) kegunaan penelitian, (f) ruang

lingkup dan keterbatasan penelitian, (g) penegasan istilah, dan (h) sistematika penulisan skripsi.

**Bab II : Landasan Teori**

Dalam bab landasan teori ini terdiri dari: (a) kajian teoritis mengenai investasi, (b) kajian teoritis mengenai infrastruktur, (c) kajian teoritis mengenai angkatan kerja, (d) kajian teoritis mengenai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), (e) penelitian terdahulu, (f) kerangka konseptual, (g) hipotesis penelitian.

**Bab III : Metode Penelitian**

Dalam bab metode penelitian ini terdiri dari: (a) pendekatan dan jenis penelitian, (b) populasi, sampling, dan sampel penelitian, (c) sumber data dan variabel penelitian, (d) teknik pengumpulan data, (e) teknik analisis data.

**Bab IV : Hasil Penelitian**

Dalam bab hasil penelitian ini di dalamnya berisi mengenai (a) deskripsi data dan (b) analisis data.

**Bab V : Pembahasan**

Dalam bab pembahasan ini berisi mengenai uraian jawaban dari hasil penelitian dan mengulas secara teoritik dari hasil penelitian.

## Bab VI : Penutup

Dalam bab penutup ini berisi mengenai: (a) kesimpulan dan (b) saran.

### 3. Bagian Akhir

Pada bagian akhir ini terdiri dari: (a) daftar pustaka, (b) lampiran-lampiran, (c) surat pernyataan keaslian skripsi, dan (d) daftar riwayat hidup.